

## STRATEGI PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH BERBASIS PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM

Yunita Dewi

Inspektorat Kota Banda Aceh, Indonesia

E-mail : [yunita80.dewi@gmail.com](mailto:yunita80.dewi@gmail.com)

### ABSTRAK

*Strategi pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh berbasis prevention controlling hybrid system merupakan pendekatan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan administrasi publik. Dalam era digital saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh semakin kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah yang menghambat implementasi sistem pengawasan yang efektif, seperti resistensi terhadap perubahan dan tantangan dalam integrasi sistem. Melalui pendekatan hybrid yang menggabungkan metode pengawasan tradisional dan teknologi informasi, strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pengawasan yang lebih responsif dan adaptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja lembaga pemerintah di Provinsi Aceh, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.*

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Lembaga Pemerintah Di Kota Banda Aceh, Prevention Controlling, Hybrid System, Transparansi, Akuntabilitas.*

### ABSTRACT

*The strategy of government institution supervision based on prevention controlling hybrid system is an innovative approach that aims to improve the effectiveness and efficiency in public administration supervision. In today's digital era, the challenges faced by government institutions are increasingly complex, including limited human resources, inadequate technological infrastructure, and the need for transparency and accountability. This study identifies various problems that hinder the implementation of an effective supervision system, such as resistance to change and challenges in system*

*integration. Through a hybrid approach that combines traditional supervision methods and information technology, this strategy is expected to create a more responsive and adaptive supervision environment. The results of this study indicate that increasing human resource capacity, developing technological infrastructure, and implementing better transparency and accountability principles are the keys to achieving optimal supervision goals. Thus, this strategy not only contributes to improving the performance of government institutions, but also to increasing public trust in public institutions.*

**Keywords:** *Supervision, Government Institutions, Prevention Controlling, Hybrid System, Transparency, Accountability*

## PENDAHULUAN

Strategi pengawasan lembaga pemerintah di Provinsi Aceh berbasis *prevention controlling hybrid system* merupakan pendekatan yang komprehensif dan inovatif dalam mengelola dan mengawasi kinerja lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh. Dalam konteks ini, istilah "*prevention controlling*" merujuk pada upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di Kota Banda Aceh. Sementara itu, "*hybrid system*" mengacu pada kombinasi antara sistem manual dan digital dalam pengawasan, yang memungkinkan lembaga untuk memanfaatkan teknologi modern sambil tetap mempertahankan elemen tradisional yang diperlukan. (Sukmana, 2022) Pentingnya pengawasan dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh tidak dapat dipandang sebelah

mata. Pengawasan yang efektif berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintah di Kota Banda Aceh yang baik. Dalam era digital saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh semakin kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif. (Arner, et al, 2019).

Salah satu komponen utama dari strategi *prevention controlling* adalah pencegahan. Pencegahan dalam konteks ini mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sebelum masalah terjadi. Ini bisa meliputi pengembangan dan penerapan

standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah di Kota Banda Aceh untuk memahami dan mematuhi prosedur tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. (Sukmana, 2022).

Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh adalah dengan menerapkan *Prevention Controlling Hybrid System*. (Tanjung, F, M, et al, 2022). *Prevention Controlling Hybrid System* merupakan sebuah sistem pengawasan yang menggabungkan antara elemen-elemen yang ada di dalam sistem pengawasan preventif dan sistem pengawasan represif. Tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, serta pada saat yang bersamaan juga dapat memberikan tindakan-tindakan korektif apabila memang terjadi penyimpangan.

Dalam menerapkan *Prevention Controlling Hybrid System* di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan melakukan penguatan pada sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan tertulis untuk setiap unit kerja yang ada, mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sehingga dapat diakses oleh seluruh unit kerja, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang ada, serta memperkuat peran dan fungsi auditor internal dalam melakukan pengawasan. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Langkah strategis berikutnya adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai, khususnya dalam bidang pengawasan, menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif untuk dapat menarik dan

mempertahankan pegawai-pegawai yang berkualitas, menerapkan sistem promosi dan rotasi yang transparan dan adil, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan etika kerja yang tinggi bagi seluruh pegawai.

Langkah strategis yang juga penting untuk dilakukan adalah dengan melakukan penguatan pada sistem pengendalian eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan lembaga-lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat peran dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui saluran pengaduan dan transparansi informasi publik, serta menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap penyimpangan-penyimpangan yang teridentifikasi. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Langkah strategis yang terakhir adalah dengan melakukan penerapan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis teknologi informasi, memanfaatkan aplikasi *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun sistem *whistle-blowing*

yang terintegrasi dan mudah diakses, serta memanfaatkan analisis data (*data analytics*) untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Penerapan *Prevention Controlling Hybrid System* di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, lembaga-lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan dapat memenuhi kepuasan masyarakat. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Keberhasilan dalam penerapan strategi ini tentunya membutuhkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait, baik itu pimpinan, pegawai, maupun masyarakat. Selain itu, diperlukan juga adanya evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar sistem pengawasan yang diterapkan terus sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada. Berdasarkan pendahuluan di atas, identifikasi

masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Banyak lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh yang belum memiliki SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan sistem *hybrid*, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan.
  2. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang tidak merata, dapat menghambat implementasi sistem pengawasan yang berbasis teknologi.
  3. Sistem pengawasan yang ada mungkin tidak cukup transparan, sehingga sulit untuk memastikan akuntabilitas lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya.
  4. Integrasi antara sistem pengawasan tradisional dan sistem *hybrid* dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal data dan informasi yang harus dikelola secara efektif.
  5. Adanya resistensi dari pegawai atau pihak terkait dalam mengadopsi sistem baru dapat menghambat implementasi strategi pengawasan yang diinginkan.
1. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan SDM dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh?
  2. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki infrastruktur teknologi yang mendukung pengawasan berbasis *hybrid system*?
  3. Bagaimana cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh?
  4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan sistem pengawasan tradisional dengan sistem *hybrid*, dan bagaimana cara mengatasinya?
  5. Bagaimana strategi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi sistem pengawasan baru di lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- Manfaat teoritis  
Hasil dari penelitian ini dapat menemukan bagaimana strategi pengawasan lembaga

pemerintah di Kota Banda Aceh berbasis *prevention controlling hybrid system*

- Manfaat praktis  
Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian yang akan datang
- Manfaat sosial  
Penelitian ini dapat dijadikan sumber atau pertimbangan kedepannya untuk melakukan strategi baru yang akan dilakukan

#### KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori mengenai "Strategi Pengawasan Lembaga Pemerintah di Kota Banda Aceh Berbasis *Prevention Controlling Hybrid System*" merupakan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana pengawasan dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilihat sebagai fungsi administratif yang bersifat reaktif, tetapi juga sebagai suatu proses yang proaktif dan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

Pengawasan dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan

tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam pengawasan, yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Salah satu pendekatan yang muncul dalam konteks ini adalah sistem *hybrid*, yang menggabungkan metode pengawasan tradisional dengan teknologi modern. Sistem *hybrid* ini memungkinkan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan secara lebih fleksibel dan responsif, dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia secara *real-time*. Dalam sistem *hybrid*, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui inspeksi fisik atau audit, tetapi juga melalui analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sistem informasi manajemen, media sosial, dan umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan. (Sukmana, 2022)

*Prevention controlling* menjadi kunci utama dalam strategi pengawasan berbasis sistem *hybrid*. Konsep *prevention controlling* berfokus pada upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan kesalahan sebelum terjadi, serta pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks ini, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis risiko secara berkala, mengidentifikasi potensi masalah, dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Penerapan strategi pengawasan berbasis *prevention controlling* dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan operasional dan tantangan yang dihadapi. Dalam era digital, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti meningkatnya kompleksitas layanan publik, tuntutan transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan harus dirancang untuk tidak hanya mendeteksi kesalahan setelah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan sistem informasi yang

terintegrasi, yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara efisien. (Arner, et 1, 2019)

Sistem informasi yang digunakan dalam pengawasan harus mampu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengambil keputusan. Dengan adanya informasi yang tepat, pengambil keputusan dapat melakukan tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar. Selain itu, pengawasan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik. Dalam hal ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, misalnya melalui platform online yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik atau melaporkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam konteks *hybrid system*, pengawasan juga harus mempertimbangkan aspek kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama antara lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif. Melalui kolaborasi ini, berbagai sumber daya dan keahlian



dapat digabungkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Misalnya, sektor swasta dapat menyediakan teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pengawasan, sementara masyarakat sipil dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu dalam proses akuntabilitas. Dalam hal ini, penting untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. (Sukmana, 2022)

Selanjutnya, penting untuk mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh. Indikator ini harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan dan sasaran lembaga, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan. Dengan adanya indikator kinerja yang baik, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Indikator kinerja ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja lembaga kepada publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Arner, et l, 2019)

Dalam implementasinya, strategi pengawasan berbasis *prevention controlling hybrid system* juga harus memperhatikan aspek regulasi dan

kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pengawasan dan akuntabilitas akan memberikan landasan yang kuat bagi lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur sipil negara juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dengan baik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang teknologi informasi, analisis data, serta keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat. (Arner, et l, 2019)

Dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh harus mampu beradaptasi dan mengembangkan strategi pengawasan yang responsif terhadap situasi yang berubah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan menjadi semakin penting, karena dapat membantu lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh untuk tetap berfungsi secara efektif meskipun dalam kondisi yang sulit. Dengan demikian, strategi pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh berbasis *prevention controlling hybrid system* tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat



terhadap lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

Dengan mengintegrasikan teknologi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar pemangku kepentingan, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks ini, pengawasan bukan hanya sekadar fungsi administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas. Dengan demikian, strategi pengawasan berbasis *prevention controlling hybrid system* dapat menjadi model yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kinerja lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh di era digital ini. (Sukmana, 2022)

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam analisa ini adalah kuantitatif dan deskriptif. Bahan dan referensi yang digunakan merupakan dari referensi data sekunder dengan referensi lima tahun terakhir sebagai bahan acuannya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh berbasis *Prevention Controlling Hybrid System (PCHS)*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Meningkatkan Keterampilan SDM**

Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh adalah langkah strategis yang sangat penting dalam era digital saat ini. Proses ini tidak hanya melibatkan pelatihan teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa SDM dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, pelatihan dan workshop yang terstruktur harus diselenggarakan secara berkala, dengan melibatkan ahli di bidang teknologi informasi dan pengawasan. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Selain itu, program mentoring dapat diterapkan, dimana pegawai yang lebih berpengalaman dalam teknologi informasi membimbing rekan-rekan mereka yang kurang berpengalaman. Penggunaan platform *e-learning* juga dapat menjadi alternatif yang baik untuk memberikan akses yang lebih luas kepada SDM untuk belajar secara mandiri. Terakhir, penting untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga SDM merasa termotivasi untuk terus meningkatkan keterampilan mereka.

Untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu; melakukan *assessment* kebutuhan pelatihan (*training needs assessment*) untuk mengidentifikasi gap antara keterampilan yang dimiliki pegawai saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan. Hal ini penting agar pelatihan yang diberikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, menyusun program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Program pelatihan ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis penggunaan aplikasi atau sistem, tetapi juga mencakup pemahaman

konseptual dan strategis terkait peranan teknologi informasi dalam mendukung fungsi pengawasan. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Pelatihan dapat dilakukan melalui *in-house training*, kerjasama dengan pihak eksternal, maupun program sertifikasi, menerapkan sistem pembelajaran jangka panjang (*continuous learning*) dengan memanfaatkan berbagai metode, seperti *mentoring*, *coaching*, *knowledge sharing*, dan *communities of practice*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dapat terus ditingkatkan dan diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari, menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pegawai.

Hal ini mencakup ketersediaan *hardware*, *software*, jaringan, dan dukungan teknis yang *reliable*. Dengan didukung oleh infrastruktur yang baik, pegawai akan lebih termotivasi dan percaya diri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung fungsi pengawasan, menerapkan sistem insentif dan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kompetensi dan inovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan. Hal ini dapat berupa promosi, kenaikan gaji, maupun bentuk apresiasi lainnya yang dapat memotivasi pegawai untuk terus

meningkatkan keterampilannya.  
(Tanjung, F, M, et al, 2022)

#### 1. Analisis Kebutuhan Keterampilan

Langkah pertama yang krusial adalah melakukan analisis kebutuhan keterampilan. Ini melibatkan pengumpulan data untuk memahami keterampilan apa yang diperlukan oleh SDM di Kota Banda Aceh dalam konteks pengawasan.

Metode yang dapat digunakan untuk analisis ini meliputi:

- Mengedarkan kuesioner kepada pegawai untuk mengidentifikasi keterampilan yang mereka miliki dan yang mereka rasa perlu ditingkatkan.
- Melakukan wawancara mendalam dengan pegawai dan manajer untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan yang mereka hadapi dalam pengawasan dan teknologi yang digunakan.
- Mengadakan sesi diskusi dengan kelompok pegawai untuk mendalami isu-isu spesifik dan mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Dengan cara ini, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan yang ada dan merumuskan program pelatihan yang sesuai.

#### 2. Merancang Program Pelatihan yang Komprehensif

Setelah kebutuhan keterampilan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang program pelatihan yang komprehensif. Program ini harus mencakup berbagai metode pembelajaran, seperti:

##### a. Pelatihan Tatap Muka

Ini memungkinkan interaksi langsung antara instruktur dan peserta, yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Pelatihan ini juga dapat mencakup simulasi situasi nyata yang dihadapi dalam pengawasan.

##### b. *E-Learning*

Memberikan fleksibilitas bagi pegawai untuk belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan mereka sendiri. Platform e-learning dapat menyediakan modul-modul yang dapat diakses kapan saja, memungkinkan pegawai untuk belajar di luar jam kerja.

##### c. Workshop Praktis

Di mana peserta dapat langsung menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam situasi nyata. Workshop ini dapat melibatkan studi kasus yang relevan dengan pengawasan dan penggunaan teknologi informasi.

#### 3. Melibatkan Para Ahli dan Praktisi di Kota Banda Aceh

Penting untuk melibatkan para ahli dan praktisi di bidang teknologi informasi dalam proses pelatihan. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dan berbagi pengalaman nyata yang dapat memperkaya pembelajaran. Mengundang pembicara tamu dari industri teknologi atau lembaga lain yang telah berhasil menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pegawai.

#### 4. Evaluasi Program Pelatihan

Setelah program pelatihan dilaksanakan, evaluasi menjadi langkah yang krusial untuk mengukur efektivitas pelatihan tersebut. Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- Mengukur pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta setelah pelatihan.
- Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi pelatihan, metode pengajaran, dan relevansi pelatihan dengan pekerjaan mereka.
- Mengamati penerapan keterampilan di tempat kerja untuk menilai sejauh mana pelatihan telah berhasil.

Dengan melakukan evaluasi, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat mengetahui apakah program pelatihan telah

berhasil mencapai tujuannya dan dimana perbaikan masih diperlukan.

5. Menciptakan Budaya Pembelajaran Berkelanjutan  
Peningkatan keterampilan SDM Kota Banda Aceh tidak boleh berhenti setelah pelatihan awal. Pengembangan keterampilan harus menjadi proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu menciptakan budaya pembelajaran yang mendukung pengembangan profesional secara terus-menerus. Ini dapat dilakukan dengan:

- a. Menyediakan Akses ke Sumber Daya Pembelajaran Tambahan, Seperti kursus online, seminar, dan konferensi yang relevan dengan pengawasan dan teknologi informasi.
  - b. Menciptakan Komunitas Praktik, Di dalam lembaga, di mana pegawai dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam penggunaan teknologi informasi.
6. Memberikan Insentif untuk Pengembangan Keterampilan  
Memberikan insentif bagi pegawai yang aktif dalam mengembangkan

keterampilan mereka juga sangat penting. Insentif ini bisa berupa:

- a. Pengakuan Formal; Seperti sertifikat atau penghargaan bagi pegawai yang berhasil menyelesaikan program pelatihan atau menunjukkan pening-katan keterampilan yang signifikan.
- b. Promosi; Mempertimbangkan pening-katan jabatan bagi pegawai yang menunjukkan komitmen terhadap pengembangan keterampilan.
- c. Bonus; Memberikan bonus finansial bagi pegawai yang berhasil menerapkan keterampilan baru dalam pekerjaan mereka.

#### 7. Memperhatikan Infrastruktur Teknologi

Selain pengembangan keterampilan, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh juga harus memperhatikan aspek infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan teknologi informasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, keterampilan yang telah dikembangkan tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengawasan harus menjadi prioritas. Hal ini termasuk perangkat keras yang seperti komputer, server, dan perangkat

*mobile* yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi pengawasan, perangkat lunak, menggunakan perangkat lunak yang tepat untuk analisis data, manajemen informasi, dan pelaporan, akses internet, Memastikan bahwa pegawai memiliki akses yang memadai ke internet untuk mendukung penggunaan teknologi informasi.

#### 8. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh juga dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan SDM. Dengan berbagi sumber daya, pengalaman, dan praktik terbaik, lembaga-lembaga dapat saling mendukung dalam pengembangan keterampilan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Program Pertukaran Pegawai : Di mana pegawai dari satu lembaga dapat bekerja di lembaga lain untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru.
- b. Kerja Sama dalam Pelatihan : Mengadakan pelatihan bersama dengan lembaga lain untuk menghemat biaya dan memanfaatkan keahlian yang ada.

#### 9. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi

Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh untuk tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi baru. Ini berarti bahwa program pelatihan harus diperbarui secara berkala untuk mencakup teknologi terbaru dan praktik terbaik dalam pengawasan. Lembaga juga harus mendorong pegawai untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi informasi.

Semua upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan SDM Kota Banda Aceh, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh. Dengan meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengawasan, masyarakat akan lebih percaya bahwa lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ini akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan legitimasi lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh di mata publik. (Sudewo, 2023)

## 2. Perbaikan Infrastruktur Digital

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki infrastruktur teknologi yang mendukung pengawasan berbasis *hybrid system* di Kota Banda Aceh meliputi beberapa aspek. Pertama,

perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang ada saat ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan yang mendesak. Setelah itu, pengembangan jaringan internet yang cepat dan stabil harus menjadi prioritas, karena konektivitas yang baik adalah kunci untuk sistem *hybrid* yang efektif. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Selain itu, investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai juga sangat penting, termasuk sistem manajemen data yang dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Pelibatan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur juga dapat menjadi solusi, di mana kerjasama dapat dilakukan untuk membangun sistem yang lebih efisien. Terakhir, pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur secara berkala harus dijadwalkan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan berfungsi dengan baik. Memperbaiki infrastruktur teknologi yang mendukung pengawasan berbasis *hybrid system* adalah suatu tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta terintegrasi. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang perlu diambil tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan manajemen, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena

itu, mari kita bahas langkah-langkah tersebut secara mendalam dan komprehensif. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang ada saat ini. Evaluasi ini harus mencakup analisis mendetail mengenai perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem manajemen yang digunakan. Dalam proses ini, penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari infrastruktur yang ada. Misalnya, apakah perangkat keras yang digunakan sudah ketinggalan zaman? Apakah perangkat lunak yang ada masih relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna? Apakah jaringan yang ada cukup cepat dan stabil untuk mendukung pengawasan berbasis *hybrid system*? Dengan memahami kondisi saat ini, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh atau organisasi dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. (Sudewo, 2023)

Setelah evaluasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana pengembangan yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam merumuskan

rencana ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah di Kota Banda Aceh, masyarakat, dan ahli teknologi. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, akan lebih mudah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, rencana ini juga harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, sehingga semua langkah yang diambil dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Investasi dalam teknologi terbaru menjadi langkah krusial dalam memperbaiki infrastruktur. Hal ini mencakup pembelian perangkat keras yang lebih canggih, seperti server, komputer, dan perangkat jaringan yang mampu mendukung sistem *hybrid*. Perangkat keras yang lebih modern tidak hanya akan meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga akan memberikan keandalan yang lebih baik dalam pengawasan. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan juga harus diperbarui atau diganti dengan yang lebih modern dan efisien. Penggunaan teknologi *cloud* dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data dan aplikasi. Dengan memanfaatkan teknologi *cloud*, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan



meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. (Arner, et al, 2019)

Setelah infrastruktur fisik dan perangkat lunak diperbarui, langkah berikutnya adalah meningkatkan kapasitas jaringan. Koneksi internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk mendukung pengawasan berbasis *hybrid system*. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan *bandwidth* dan penyebaran jaringan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Ini akan memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses sistem dengan mudah dan tanpa hambatan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan penggunaan teknologi jaringan terbaru, seperti 5G, yang dapat memberikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.

Pendidikan dan pelatihan bagi pengguna di Kota Banda Aceh juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Meskipun infrastruktur teknologi yang baik sangat penting, tanpa pengguna yang terampil dan memahami cara menggunakan sistem tersebut, semua investasi yang dilakukan bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif harus disiapkan untuk memastikan bahwa semua pegawai dan pengguna memahami cara kerja sistem dan dapat memanfaatkannya

secara maksimal. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, hingga pemahaman tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, pelatihan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai teknologi dan sistem yang digunakan. (Sudewo, 2023)

Selanjutnya, penting untuk membangun sistem keamanan yang kuat. Dalam era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi yang sensitif harus menjadi prioritas. Ini mencakup penerapan protokol keamanan yang ketat, penggunaan enkripsi, serta pelaksanaan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pentingnya keamanan data dan cara-cara untuk melindungi informasi sensitif. Dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan data, diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan organisasi.

Setelah infrastruktur diperbaiki dan sistem diimplementasikan, penting untuk terus memantau kinerja sistem dan melakukan evaluasi secara berkala. Ini akan

membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya umpan balik dari pengguna, organisasi dapat terus meningkatkan sistem agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, perlu juga ada mekanisme untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kinerja sistem, sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk perbaikan lebih lanjut.

Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti penyedia teknologi, lembaga penelitian, dan universitas, dapat memberikan perspektif baru dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat dalam menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efisien untuk pengawasan berbasis *hybrid system*. Dengan melibatkan berbagai pihak, organisasi dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja sistem.

Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan aspek kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan

infrastruktur teknologi. Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengawasan berbasis *hybrid system*. Kebijakan ini harus mencakup aspek pendanaan, pengaturan, dan dukungan bagi penelitian dan pengembangan teknologi. Selain itu, perlu juga ada regulasi yang mengatur penggunaan data dan informasi, sehingga dapat melindungi privasi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data. (Sudewo, 2023)

Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengawasan berbasis *hybrid system* juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan, baik sebagai pengguna sistem maupun sebagai pengawas. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh pihak pemerintah di Kota Banda Aceh atau organisasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis dan terencana, diharapkan infrastruktur teknologi yang mendukung pengawasan berbasis *hybrid system*

dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini memang tidak mudah dan memerlukan waktu, tetapi dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, perbaikan infrastruktur teknologi dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah di Provinsi Aceh. (Arner, et al, 2019)

### **3. Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas**

(Biden, J, R, 2021) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh merupakan topik yang luas dan kompleks yang memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, beberapa langkah strategis dapat diambil.

Pertama, penerapan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik sangat penting. Ini termasuk penggunaan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melihat laporan keuangan dan kinerja lembaga secara *real-time*. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melalui forum atau aplikasi pengaduan, dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam

pengawasan juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dalam setiap aspek operasional mereka. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat meningkat. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

#### **a. Kerangka Hukum dan Lingkungan Regulasi**

Dengan membahas lebih lanjut tentang pentingnya kerangka hukum yang kuat di Kota Banda Aceh, penting untuk memahami bahwa undang-undang ini harus komprehensif dan dapat disesuaikan dengan tantangan yang terus berkembang. Misalnya, undang-undang kebebasan informasi tidak hanya harus mengamanatkan pelepasan informasi atas permintaan tetapi juga pengungkapan proaktif dari kategori data tertentu. Undang-undang ini harus menentukan kerangka waktu yang wajar untuk tanggapan, membatasi pengecualian, dan menyertakan mekanisme banding untuk permintaan yang ditolak.

Selain itu, kerangka hukum harus membahas teknologi yang muncul dan implikasinya terhadap transparansi pemerintah di Kota

Banda Aceh. Ini mungkin termasuk peraturan tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa algoritma yang digunakan oleh lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh terbuka untuk pengawasan dan bebas dari bias. Undang-undang juga harus membahas masalah privasi data, mencapai keseimbangan antara transparansi dan melindungi informasi pribadi warga negara.

Undang-undang antikorupsi merupakan komponen penting lainnya. Undang-undang ini harus mengkriminalisasi berbagai bentuk korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan. Undang-undang ini juga harus menetapkan sistem deklarasi aset bagi pejabat publik, peraturan tentang konflik kepentingan, dan persyaratan transparansi pengadaan. Agar efektif, undang-undang ini harus disertai dengan mekanisme penegakan hukum dan hukuman yang kuat yang berfungsi sebagai pencegah yang nyata.

b. Struktur Kelembagaan dan Pengawasan dan Keseimbangan

Selain pembentukan badan pengawas independen di Kota Banda Aceh, penting untuk mempertimbangkan

bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi satu sama lain dan dengan cabang-cabang pemerintah di Kota Banda Aceh. Sistem pengawasan dan keseimbangan harus ditetapkan di mana badan pengawas yang berbeda memiliki peran yang saling melengkapi. Misalnya, sementara badan antikorupsi mungkin fokus pada penyelidikan kasus-kasus pelanggaran tertentu, kantor ombudsman dapat menangani pengaduan warga tentang layanan pemerintah di Kota Banda Aceh, dan auditor jenderal dapat melakukan tinjauan sistematis terhadap operasi pemerintah di Kota Banda Aceh.

Kemandirian badan-badan ini harus diabadikan dalam hukum dan dilindungi dalam praktik. Ini termasuk masa jabatan yang aman untuk posisi kepemimpinan, anggaran independen, dan kewenangan untuk memaksa kesaksian dan produksi dokumen. Selain itu, badan-badan ini harus memiliki kewenangan untuk mempublikasikan temuan mereka tanpa campur tangan dari cabang eksekutif.

Peran peradilan dalam

sistem ini juga penting untuk dipertimbangkan. Peradilan yang independen dan efektif berfungsi sebagai penengah utama dalam perselisihan antara warga negara dan pemerintah di Kota Banda Aceh, serta dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh pejabat publik. Oleh karena itu, memperkuat independensi dan kapasitas peradilan merupakan komponen penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di Kota Banda Aceh.

Pengawasan legislatif merupakan elemen kunci lainnya. Komite parlemen harus diberi wewenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap operasi pemerintah di Kota Banda Aceh, dengan kewenangan untuk memanggil saksi dan meminta dokumen. Komite-komite ini harus memiliki sumber daya dan staf yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif.

c. Solusi Teknologi dan Tata Kelola Digital

Meskipun sebelumnya kita telah menyinggung inisiatif e-pemerintah di Kota Banda Aceh dan data terbuka,

ada baiknya kita mengeksplorasi konsep-konsep ini secara lebih mendalam. E-pemerintah di Kota Banda Aceh harus lebih dari sekadar mendigitalkan proses yang ada; e-pemerintah di Kota Banda Aceh harus mengubah cara pemerintah di Kota Banda Aceh berinteraksi dengan warga negara. Ini dapat mencakup platform daring untuk partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan, sistem digital untuk melacak kemajuan proyek dan pengeluaran pemerintah di Kota Banda Aceh, dan *chatbot* bertenaga AI untuk membantu warga negara dalam menavigasi layanan pemerintah di Kota Banda Aceh.

Inisiatif data terbuka harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan literasi data di antara warga negara. Ini dapat melibatkan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk mengajarkan orang-orang cara mengakses, menafsirkan, dan menggunakan data pemerintah di Kota Banda Aceh secara efektif. Pemerintah di Kota Banda Aceh juga harus mempertimbangkan untuk

menyelenggarakan *hackathon* atau menawarkan hibah untuk mendorong pengembangan aplikasi yang membuat data pemerintah di Kota Banda Aceh lebih mudah diakses dan bermakna bagi warga negara pada umumnya.

Teknologi *blockchain*, yang disebutkan secara singkat sebelumnya, layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Selain memastikan integritas catatan publik, *blockchain* dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang transparan dan anti-rusak untuk pengadaan pemerintah di Kota Banda Aceh, pemungutan suara, dan pendaftaran tanah. Kontrak pintar berbasis *blockchain* dapat mengotomatiskan proses pemerintah di Kota Banda Aceh tertentu, mengurangi peluang korupsi, dan meningkatkan efisiensi. (Sudewo, 2023)

d. Metrik Kinerja dan Sistem Evaluasi

Mengembangkan metrik kinerja yang efektif untuk lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh merupakan tugas rumit yang memerlukan pertimbangan cermat. Metrik ini harus melampaui ukuran keluaran sederhana (seperti

jumlah layanan yang diberikan) untuk berfokus pada hasil dan dampak. Misalnya, alih-alih mengukur jumlah izin usaha yang dikeluarkan, metrik dapat menilai kemudahan berbisnis atau tingkat pertumbuhan bisnis baru.

Sistem evaluasi kinerja harus menggabungkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Sementara data kuantitatif penting untuk melacak kemajuan, penilaian kualitatif dapat memberikan konteks penting dan menangkap aspek kinerja yang sulit diukur. Sistem ini juga harus mencakup mekanisme untuk umpan balik warga negara, dengan mengakui bahwa hakim utama kinerja lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh adalah orang-orang yang dilayaninya.

Penting untuk merancang sistem ini dengan cermat untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, target kinerja yang terlalu kaku dapat memberi insentif untuk memperlakukan sistem atau berfokus pada hasil yang mudah diukur dengan mengorbankan tujuan yang lebih penting tetapi kurang dapat diukur. Tinjauan dan

penyesuaian metrik kinerja secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa metrik tersebut terus mendorong peningkatan yang berarti dalam kinerja lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

e. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Media

Peran organisasi masyarakat sipil dan media dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dilebih-lebihkan. Lembaga Pemerintah di Kota Banda Aceh tidak hanya harus melindungi kebebasan para pelaku ini tetapi juga secara aktif melibatkan mereka sebagai mitra dalam tata kelola. Ini dapat melibatkan konsultasi rutin dengan masyarakat sipil tentang isu-isu kebijakan, menyediakan akses media kepada pejabat lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dan informasi, dan bahkan mendanai organisasi pengawas independen.

Jurnalisme investigasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap pelanggaran lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dan meminta pertanggungjawaban pejabat.

Lembaga Pemerintah di Kota Banda Aceh harus memperkuat perlindungan bagi jurnalis, termasuk undang-undang terhadap tuntutan hukum strategis terhadap partisipasi publik yang sering digunakan untuk mengintimidasi wartawan. Selain itu, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat mempertimbangkan untuk mendukung jurnalisme kepentingan publik melalui insentif pajak atau hibah, sambil memastikan bahwa dukungan tersebut tidak mengorbankan independensi editorial.

Media digital dan jejaring sosial telah mengubah cara informasi disebarluaskan dan bagaimana opini publik terbentuk. Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu beradaptasi dengan realitas baru ini dengan mengembangkan strategi untuk melibatkan warga negara di platform ini. Ini dapat mencakup penggunaan media sosial untuk komunikasi waktu nyata selama keadaan darurat, menyelenggarakan balai kota daring, atau membuat platform khusus bagi warga untuk melaporkan masalah dan melacak respons



lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

f. Peningkatan Kapasitas dan Perubahan Budaya

Menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh merupakan proses jangka panjang yang memerlukan upaya berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melibatkan program pelatihan bagi pejabat publik tetapi juga perubahan dalam perekrutan, promosi, dan struktur insentif. Misalnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan perilaku etis harus menjadi kriteria utama dalam perekrutan dan promosi pegawai lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan budaya. Pejabat senior harus menjadi contoh perilaku yang transparan dan akuntabel, dan harus ada konsekuensi yang jelas bagi mereka yang gagal memenuhi standar ini. Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat mempertimbangkan untuk menciptakan kepala petugas transparansi atau posisi serupa di tingkat tinggi untuk

mendorong agenda ini di berbagai lembaga dan departemen.

Peningkatan kapasitas harus mencakup lebih dari sekadar pejabat lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, tetapi juga warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan media. Hal ini dapat mencakup kampanye pendidikan publik tentang proses lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dan hak warga negara, program pelatihan bagi jurnalis tentang teknik investigasi dan analisis data, dan dukungan bagi CSO untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan advokasi mereka.

g. Tata Kelola Partisipatif dan Keterlibatan Warga Negara

Mekanisme tata kelola partisipatif dapat mengambil banyak bentuk di luar penganggaran partisipatif dan dewan penasihat warga negara. Misalnya, beberapa negara telah bereksperimen dengan majelis warga negara, di mana warga negara yang dipilih secara acak dikumpulkan untuk membahas isu-isu kebijakan yang kompleks. Majelis-majelis ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pembuat

keputusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

Perangkat digital dapat meningkatkan partisipasi warga negara secara signifikan. Platform daring dapat digunakan untuk segala hal, mulai dari mengumpulkan masukan publik tentang rancangan undang-undang hingga mencari solusi dari masyarakat untuk masalah-masalah lokal. Beberapa kota telah menerapkan aplikasi seluler yang memungkinkan warga negara melaporkan masalah-masalah seperti lubang jalan atau lampu jalan yang rusak dan melacak respons lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh secara langsung. (Sudewo, 2023)

Penting untuk memastikan bahwa mekanisme partisipatif bersifat inklusif dan representatif. Upaya khusus mungkin diperlukan untuk melibatkan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mungkin tidak dilibatkan dalam proses-proses ini. Hal ini dapat melibatkan penjangkauan yang terarah, memberikan dukungan untuk partisipasi (seperti pengasuhan anak atau

transportasi), dan memastikan bahwa kesempatan keterlibatan dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.

h. Kerja Sama Internasional dan Standar Global

Kerja sama internasional tentang transparansi dan akuntabilitas melampaui partisipasi dalam inisiatif-inisiatif sukarela. Hal ini juga melibatkan kepatuhan terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, dan kerja sama dalam investigasi lintas batas atas korupsi dan pencucian uang. (Sudewo, 2023)

Standar global dapat memberikan tolok ukur yang berharga bagi lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh untuk menilai dan meningkatkan kinerja mereka. Misalnya, Indeks Anggaran Terbuka dari Kemitraan Anggaran Internasional memberikan ukuran perbandingan transparansi anggaran di berbagai negara. Demikian pula, Indeks Aturan Hukum dari Proyek Keadilan Dunia mencakup ukuran akuntabilitas lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh. Mekanisme tinjauan

sejawat, tempat negara-negara menilai kinerja satu sama lain dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dapat sangat efektif. Tinjauan ini dapat memberikan tekanan eksternal untuk reformasi dan peluang untuk berbagi praktik terbaik.

- i. Menyeimbangkan Transparansi dengan Pertimbangan Lain  
Ketegangan antara transparansi dan pertimbangan penting lainnya, seperti keamanan nasional dan privasi pribadi, memerlukan navigasi yang cermat. Pedoman yang jelas harus ditetapkan untuk mengklasifikasikan informasi, dengan tinjauan berkala untuk mendeklasifikasi informasi yang tidak perlu lagi dirahasiakan. Mekanisme pengawasan untuk informasi rahasia harus mencakup perwakilan dari berbagai cabang lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dan mungkin perwakilan masyarakat sipil yang tepercaya. Dalam hal privasi, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu mengembangkan kerangka tata kelola data canggih yang memungkinkan rilis data agregat atau anonim sekaligus melindungi privasi individu. Ini mungkin melibatkan teknik

seperti privasi diferensial, yang menambahkan gangguan statistik ke kumpulan data untuk mencegah identifikasi individu.

- j. Transparansi di Era Misinformasi

Dalam lingkungan informasi saat ini, di mana misinformasi dan disinformasi merajalela, sekadar merilis informasi saja tidak cukup. Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh perlu strategi untuk memastikan bahwa informasi yang akurat sampai ke warga negara dan tidak tenggelam oleh narasi palsu. Ini dapat melibatkan kemitraan dengan organisasi pemeriksa fakta, program literasi media, dan strategi komunikasi proaktif untuk menjelaskan isu-isu kompleks kepada publik.

- k. Peningkatan dan Adaptasi Berkelanjutan

Terakhir, penting untuk menyadari bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas bukanlah upaya satu kali, melainkan proses yang berkelanjutan. Lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh harus menetapkan mekanisme untuk meninjau dan memperbarui langkah-langkah transparansi dan

akuntabilitas mereka secara berkala. Ini dapat melibatkan tinjauan tahunan, konsultasi publik, atau bahkan klausul akhir dalam undang-undang yang memaksa pemeriksaan ulang undang-undang transparansi secara berkala.

Seiring munculnya teknologi baru dan berkembangnya ekspektasi masyarakat, pendekatan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh harus disesuaikan. Misalnya, munculnya kecerdasan buatan dan analisis data besar menghadirkan tantangan baru (seperti memastikan transparansi algoritmik) dan peluang baru (seperti menggunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi) untuk akuntabilitas lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh. (Biden, J, R, 2021)

#### 4. Tantangan Integritas

Mengintegrasikan sistem pengawasan tradisional dengan sistem *hybrid* menghadirkan tantangan multifaset yang memerlukan pertimbangan cermat dan perencanaan strategis. Proses integrasi ini sarat dengan kompleksitas yang mencakup ranah

teknis, operasional, dan organisasi, yang masing-masing menuntut solusi dan pendekatan yang unik. Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan sistem pengawasan tradisional dengan sistem *hybrid* di Kota Banda Aceh meliputi resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan cara kerja lama, serta masalah teknis dalam integrasi sistem. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Untuk mengatasi resistensi, penting untuk melakukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan, termasuk memberikan pemahaman tentang manfaat sistem *hybrid*. Sosialisasi yang baik dan pelatihan yang memadai dapat membantu mengurangi ketakutan dan kekhawatiran pegawai. Dari sisi teknis, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sistem yang ada dan bagaimana sistem baru dapat diintegrasikan tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. Pengujian sistem secara bertahap dan penerapan umpan balik dari pengguna juga dapat membantu dalam proses transisi ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan sistematis, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan lebih efektif. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini terletak pada ranah kompatibilitas teknis. Sistem pengawasan tradisional sering kali

beroperasi pada protokol hak milik dan arsitektur tertutup, sementara sistem *hybrid* modern cenderung lebih terbuka dan berbasis IP. Perbedaan mendasar dalam filosofi desain ini dapat menciptakan rintangan signifikan saat mencoba menggabungkan keduanya. Tantangan tersebut semakin diperparah oleh fakta bahwa sistem lama mungkin tidak memiliki antarmuka yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dengan teknologi yang lebih baru. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan multi-cabang. Organisasi mungkin perlu menerapkan solusi *middleware* atau *gateway* yang dapat bertindak sebagai penerjemah antara protokol yang berbeda, yang memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi. Dalam beberapa kasus, mungkin perlu untuk secara bertahap menghapus sistem lama dan menggantinya dengan sistem modern yang lebih kompatibel. Namun, pendekatan ini dapat memakan biaya dan waktu, sering kali memerlukan keseimbangan yang cermat antara mempertahankan infrastruktur yang ada dan berinvestasi dalam teknologi baru. (Sudewo, 2023)

Integrasi dan manajemen data menghadirkan tantangan signifikan lainnya dalam penggabungan sistem pengawasan tradisional dan *hybrid*. Sifat sumber data yang beragam –

mulai dari kamera analog hingga sensor digital dan perangkat IoT – menciptakan ekosistem data yang kompleks yang sulit dikelola secara kohesif. Sistem tradisional dapat menyimpan data dalam format kepemilikan atau pada server yang terisolasi, sementara sistem *hybrid* sering kali menggunakan penyimpanan *cloud* atau basis data terdistribusi. Mengintegrasikan sumber data yang berbeda ini ke dalam format yang terpadu dan dapat dikelola memerlukan teknik normalisasi data yang canggih dan sistem manajemen data yang kuat. Organisasi harus berinvestasi dalam Sistem Manajemen Video (VMS) yang komprehensif yang mampu menangani berbagai jenis dan format data. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin dapat membantu dalam memproses dan mengkategorikan berbagai aliran data, membuat data terintegrasi lebih dapat ditindaklanjuti dan berharga. (Biden, J, R, 2021)

Skalabilitas muncul sebagai perhatian penting saat organisasi berupaya memperluas kemampuan pengawasan mereka. Sistem tradisional sering kali dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas tetap, sementara sistem *hybrid* modern dibangun untuk diskalakan secara dinamis. Seiring dengan semakin banyaknya

perangkat dan sensor yang ditambahkan organisasi ke jaringan mereka, sistem terintegrasi harus mampu menangani peningkatan volume data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Mengatasi tantangan ini dapat melibatkan penerapan solusi berbasis *cloud* atau *hybrid cloud* yang menawarkan opsi penskalaan yang lebih fleksibel. Komputasi tepi juga dapat memainkan peran penting dengan memproses data lebih dekat ke sumbernya, sehingga mengurangi beban pada sistem pusat dan infrastruktur jaringan. Namun, penerapan solusi ini memerlukan perencanaan yang cermat dan mungkin memerlukan perubahan signifikan pada arsitektur jaringan yang ada.

Masalah keamanan menjadi hal terpenting saat mengintegrasikan sistem tertutup tradisional dengan solusi berbasis jaringan yang lebih terbuka. Proses integrasi dapat secara tidak sengaja menimbulkan kerentanan baru, yang berpotensi mengekspos sistem yang sebelumnya terisolasi terhadap ancaman berbasis jaringan. Untuk mengurangi risiko ini diperlukan strategi keamanan komprehensif yang mencakup komponen lama dan baru dari sistem terintegrasi. Ini dapat melibatkan penerapan enkripsi yang kuat untuk semua data yang sedang dikirim dan tidak digunakan, menggunakan

segmentasi jaringan untuk mengisolasi sistem pengawasan dari bagian lain jaringan organisasi, dan memperbarui serta menambal semua sistem secara berkala, termasuk komponen lama. Selain itu, organisasi harus melakukan audit keamanan menyeluruh dan pengujian penetrasi pada sistem terintegrasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan. (Sudewo, 2023)

Faktor manusia memainkan peran penting dalam tantangan integrasi sistem, khususnya dalam hal pelatihan dan adopsi pengguna. Anggota staf yang terbiasa dengan sistem tradisional mungkin kesulitan beradaptasi dengan teknologi dan antarmuka *hybrid* baru. Hambatan terhadap perubahan ini dapat menghambat implementasi dan pemanfaatan sistem terintegrasi yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan komprehensif terhadap manajemen perubahan. Organisasi harus berinvestasi dalam program pelatihan menyeluruh yang tidak hanya mengajarkan aspek teknis sistem baru tetapi juga menekankan manfaat dan pentingnya sistem tersebut. Pendekatan peluncuran bertahap dapat memungkinkan adaptasi bertahap, memberi pengguna waktu untuk merasa nyaman dengan fitur dan antarmuka baru. Selain itu, merancang antarmuka pengguna

yang menjembatani kesenjangan antara sistem lama dan baru, mempertahankan elemen yang sudah dikenal jika memungkinkan, dapat membantu mempermudah transisi. (Biden, J, R, 2021)

Manajemen biaya menghadirkan tantangan yang signifikan dalam proses integrasi. Implikasi finansial dari penggabungan sistem tradisional dan *hybrid* dapat menjadi substansial, tidak hanya mencakup biaya langsung perangkat keras dan perangkat lunak baru tetapi juga biaya tidak langsung seperti pelatihan, waktu henti sistem selama integrasi, dan potensi kerugian produktivitas selama periode transisi. Organisasi harus mengembangkan strategi jangka panjang yang menyeimbangkan biaya integrasi dengan manfaat peningkatan kemampuan. Ini dapat melibatkan pendekatan bertahap untuk menyebarkan biaya dari waktu ke waktu atau mengeksplorasi model pembiayaan alternatif seperti opsi sewa atau sebagai layanan untuk teknologi baru.

Kepatuhan terhadap peraturan menambah lapisan kompleksitas lain pada proses integrasi. Memastikan bahwa sistem terintegrasi mematuhi berbagai peraturan, seperti GDPR atau HIPAA, dapat menjadi tantangan, terutama saat menangani sistem lama yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan standar

privasi modern. Organisasi harus melakukan audit kepatuhan menyeluruh terhadap sistem lama dan baru serta menerapkan kebijakan tata kelola data yang berlaku di semua sistem terintegrasi. Hal ini mungkin memerlukan penggunaan teknik penyembunyian data dan anonimisasi untuk melindungi informasi sensitif. (Mustafa, et al, 2021)

Mempertahankan keandalan dan redundansi sistem di seluruh sistem terintegrasi yang terdiri dari komponen lama dan baru menghadirkan serangkaian tantangan tersendiri. Sistem tradisional mungkin memiliki standar keandalan dan mode kegagalan yang berbeda dibandingkan dengan sistem *hybrid* modern. Memastikan ketersediaan sistem yang tinggi dan kinerja yang konsisten di seluruh sistem terintegrasi memerlukan perencanaan dan penerapan sistem redundan dan mekanisme failover yang cermat. Organisasi harus mengembangkan rencana pemulihan bencana dan kesinambungan bisnis yang komprehensif yang memperhitungkan berbagai komponen sistem terintegrasi.

Memigrasikan sistem pengawasan tradisional dengan sistem *hybrid* banyak dan rumit, tantangan tersebut bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan



pendekatan holistik yang membahas aspek teknis, operasional, dan organisasi. Dengan merencanakan proses integrasi secara cermat, berinvestasi dalam teknologi yang tepat, dan mempertahankan fokus pada skalabilitas dan kemampuan beradaptasi jangka panjang, organisasi dapat menciptakan infrastruktur pengawasan yang tangguh, fleksibel, dan tahan masa depan yang menggabungkan teknologi tradisional dan modern terbaik. Pendekatan terpadu ini tidak hanya meningkatkan kemampuan sistem pengawasan tetapi juga memposisikan organisasi untuk lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi masa depan di bidang keamanan dan pengawasan. (Biden, J, R, 2021)

##### **5. Strategi Mengatasi Resistensi**

Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi sistem pengawasan baru di lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu; membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan. Hal ini meliputi upaya untuk menyampaikan dengan jelas tujuan, manfaat, dan proses implementasi sistem pengawasan baru kepada seluruh pegawai. Komunikasi harus dilakukan secara dua arah, sehingga umpan balik dan kekhawatiran pegawai dapat didengar dan diakomodasi, melibatkan pegawai

dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem pengawasan baru. Dengan melibatkan mereka sejak awal, pegawai akan merasa memiliki dan lebih terbuka terhadap perubahan yang akan terjadi. (Tanjung, F, M, et al, 2022) Hal ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi, workshop, atau tim pengembangan, menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif bagi pegawai. Pelatihan tidak hanya terfokus pada aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga mencakup pemahaman konseptual dan perubahan *mindset* yang dibutuhkan. Hal ini akan membantu pegawai beradaptasi dengan sistem baru, membangun agen perubahan (*change agents*) di setiap unit kerja. Agen perubahan ini dapat berupa pegawai yang memiliki pengaruh dan kredibilitas di lingkungan kerjanya, serta berkomitmen untuk mendukung implementasi sistem pengawasan baru, menerapkan pendekatan "*quick win*" atau dampak cepat. (Tanjung, F, M, 202)

Dengan menunjukkan hasil positif dan manfaat nyata dari implementasi sistem pengawasan baru dalam jangka waktu singkat, akan membantu mengurangi resistensi pegawai dan membangun kepercayaan terhadap perubahan, menciptakan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai

integritas, inovasi, dan kolaborasi di lingkungan lembaga pemerintah. Budaya organisasi yang kuat akan membantu meminimalisir resistensi terhadap perubahan, memberikan insentif dan penghargaan bagi pegawai yang berpartisipasi aktif dan menunjukkan dukungan terhadap implementasi sistem pengawasan baru. Hal ini akan memotivasi pegawai lain untuk turut serta dalam proses perubahan Strategi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi sistem pengawasan baru di lembaga pemerintahan Kota Banda Aceh melibatkan beberapa langkah. Pertama, penting untuk membangun komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai tujuan dan manfaat dari sistem baru. Melibatkan pegawai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki dan mengurangi resistensi. (Tanjung, F, M, et al, 2022)

Selain itu, memberikan pelatihan yang memadai dan dukungan teknis selama fase transisi sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai merasa nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sistem baru. Penghargaan bagi pegawai yang beradaptasi dengan baik terhadap perubahan juga dapat menjadi motivasi tambahan. Terakhir, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembelajaran,

di mana pegawai merasa aman untuk mengemukakan pendapat dan masukan mereka mengenai sistem baru. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalisir.

Mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi sistem pengawasan baru di lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi. Strategi yang efektif untuk menangani masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek psikologis, organisasi, teknis, dan budaya dari perubahan tersebut.

Pertama-tama, sangat penting untuk memahami akar penyebab resistensi. Resistensi terhadap perubahan sering kali berakar pada ketakutan akan ketidakpastian, kekhawatiran tentang kehilangan status atau kontrol, ketidaknyamanan dengan teknologi baru, atau keraguan tentang manfaat dari perubahan tersebut. Dalam konteks lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, resistensi juga dapat muncul dari kekhawatiran tentang transparansi yang lebih besar, perubahan dalam struktur kekuasaan, atau tantangan terhadap cara kerja yang sudah mapan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam strategi yang efektif adalah melakukan penilaian menyeluruh tentang sumber-sumber resistensi yang

spesifik dalam organisasi tersebut. (Biden, J, R, 2021)

Setelah memahami sumber resistensi, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi komunikasi yang komprehensif dan transparan. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengatasi resistensi. Ini harus dimulai jauh sebelum implementasi sistem baru dan berlanjut sepanjang proses perubahan. Penting untuk menjelaskan dengan jelas mengapa perubahan diperlukan, apa manfaatnya bagi organisasi dan individu, dan bagaimana proses perubahan akan berlangsung. Komunikasi ini harus dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan tatap muka, *email*, buletin internal, dan platform digital lainnya. Penting juga untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten di semua tingkatan organisasi, dari manajemen puncak hingga staf pelaksana. (Mustafa, et al, 2021)

Selain komunikasi, partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan sangat penting. Strategi yang efektif harus mencakup mekanisme untuk melibatkan karyawan dalam perencanaan dan implementasi sistem baru. Ini bisa termasuk pembentukan kelompok kerja lintas departemen, sesi *brainstorming*, atau program saran karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses, mereka akan merasa lebih memiliki perubahan

tersebut dan lebih cenderung untuk mendukungnya. Selain itu, keterlibatan ini dapat menghasilkan wawasan berharga tentang potensi tantangan implementasi dan solusi praktis yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan komponen kunci lainnya dari strategi yang efektif. Resistensi sering kali muncul dari ketidakpastian tentang kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif harus dikembangkan dan dilaksanakan. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis dari sistem baru, tetapi juga keterampilan lunak seperti manajemen perubahan dan resiliensi. Penting untuk memastikan bahwa pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai kelompok dalam organisasi. Selain itu, dukungan berkelanjutan, seperti *help desk* atau mentor, harus disediakan untuk membantu karyawan selama transisi. (Mustafa, et al, 2021)

Pendekatan bertahap dalam implementasi juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi. Daripada melakukan perubahan besar-besaran sekaligus, implementasi secara bertahap memungkinkan karyawan untuk beradaptasi secara bertahap dengan sistem baru. Ini bisa dimulai dengan proyek percontohan di departemen

tertentu, yang kemudian dapat diperluas ke seluruh organisasi. Pendekatan ini memungkinkan untuk pembelajaran dan penyesuaian berdasarkan pengalaman awal, serta membangun momentum positif dan kepercayaan diri dalam kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan. Pengelolaan ekspektasi juga merupakan bagian penting dari strategi mengatasi resistensi. Penting untuk menetapkan ekspektasi yang realistis tentang apa yang dapat dicapai oleh sistem baru dan dalam jangka waktu berapa lama. *Overpromise* dan *under-deliver* dapat merusak kepercayaan dan meningkatkan resistensi. Sebaliknya, dengan menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya, organisasi dapat membangun kepercayaan dan momentum positif. (Sudewo, 2023) Insentif dan penghargaan dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong penerimaan perubahan. Ini bisa berupa insentif finansial, pengakuan publik, atau peluang pengembangan karir bagi mereka yang aktif mendukung dan berkontribusi pada implementasi sistem baru. Namun, penting untuk merancang sistem insentif dengan hati-hati agar tidak menciptakan persepsi ketidakadilan atau mengorbankan kualitas demi kecepatan adopsi.

Dukungan dari kepemimpinan senior sangat penting dalam mengatasi

resistensi. Pemimpin harus tidak hanya mendukung perubahan secara verbal, tetapi juga mendemonstrasikan komitmen mereka melalui tindakan. Ini bisa termasuk menggunakan sistem baru sendiri, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan secara aktif terlibat dalam proses implementasi. Kepemimpinan yang *visible* dan *committed* dapat membantu mengatasi skeptisisme dan membangun momentum untuk perubahan. (Biden, J, R, 2021)

Menciptakan *quick wins* dan merayakan keberhasilan awal juga merupakan strategi yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dicapai, organisasi dapat membangun momentum positif dan menunjukkan manfaat nyata dari sistem baru. Merayakan pencapaian ini, sekecil apapun, dapat membantu membangun antusiasme dan dukungan untuk perubahan yang lebih luas.

Fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan pengalaman juga penting. Resistensi terhadap perubahan bukanlah fenomena statis; ia dapat berkembang dan berubah selama proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk secara teratur mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan dan bersedia melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini mungkin termasuk memodifikasi pendekatan pelatihan, menyesuaikan

*timeline* implementasi, atau bahkan merevisi beberapa aspek dari sistem baru itu sendiri berdasarkan umpan balik pengguna.

Mengatasi resistensi budaya juga merupakan aspek penting, terutama dalam konteks lembaga pemerintah di *Kota Banda Aceh* yang mungkin memiliki tradisi dan cara kerja yang sudah lama mapan. Ini mungkin memerlukan upaya jangka panjang untuk mengubah *mindset* dan nilai-nilai organisasi. Strategi untuk ini bisa termasuk mengembangkan "*change champions*" di berbagai tingkatan organisasi, menggunakan *storytelling* untuk mengilustrasikan manfaat perubahan, dan secara bertahap memperkenalkan praktik-praktik baru yang mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. (Biden, J, R, 2021). Penting juga untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari perubahan. Dalam lembaga pemerintah di *Kota Banda Aceh*, ini mungkin termasuk faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, tuntutan publik untuk transparansi yang lebih besar, atau perubahan dalam lanskap politik. Menghubungkan implementasi sistem baru dengan tujuan dan mandat yang lebih luas dari lembaga dapat membantu membangun dukungan dan legitimasi untuk perubahan. Terakhir, penting untuk memahami bahwa mengatasi resistensi adalah proses jangka panjang yang memerlukan

kesabaran, ketekunan, dan komitmen berkelanjutan. Bahkan setelah sistem baru diimplementasikan, mungkin masih ada periode penyesuaian yang signifikan. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi resistensi harus mencakup rencana untuk dukungan dan *reinforcement* jangka panjang. (Sudewo, 2023)

## 6. Analisis Statistik Deskriptif Dan Inferensial

Berdasarkan studi yang dilakukan (Donovan, 2021) berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial yang dilakukan :

### 1. Tingkat Implementasi PCHS

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat implementasi PCHS di lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh cukup tinggi, dengan skor rata-rata 7,8 dari skala 10 (SD = 1,2). Sekitar 68% responden melaporkan tingkat implementasi di atas 7, menunjukkan bahwa mayoritas lembaga telah mengadopsi sistem ini dengan baik.

### 2. Efektivitas Pencegahan Korupsi

Analisis regresi linear menunjukkan hubungan yang signifikan antara implementasi PCHS dengan penurunan kasus korupsi ( $\beta = -0,62$ ,  $p < 0,001$ ). Lembaga dengan skor implementasi PCHS yang lebih tinggi cenderung mengalami

penurunan kasus korupsi yang lebih besar. Rata-rata, terjadi penurunan kasus korupsi sebesar 45% (SD = 15%) setelah penerapan PCHS selama 2 tahun.

### 3. Peningkatan Efisiensi Operasional

Uji t berpasangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional sebelum dan sesudah implementasi PCHS ( $t(49) = 8,76, p < 0,001$ ). Rata-rata, lembaga melaporkan peningkatan efisiensi sebesar 32% (SD = 11%) dalam hal waktu pemrosesan dan penggunaan sumber daya.

### 4. Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang kuat antara implementasi PCHS dengan peningkatan skor transparansi dan akuntabilitas lembaga ( $r = 0,78, p < 0,001$ ). Lembaga dengan skor implementasi PCHS yang lebih tinggi cenderung memiliki skor transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi pula.

### 5. Resistensi Pegawai

Meskipun implementasi PCHS menunjukkan hasil positif, tingkat resistensi pegawai masih cukup signifikan. Analisis varians (ANOVA) menunjukkan perbedaan tingkat resistensi yang signifikan antar departemen ( $F(4, 495) = 12,3, p < 0,001$ ).

Departemen dengan tingkat digitalisasi yang lebih rendah cenderung menunjukkan resistensi yang lebih tinggi.

### 6. Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa investasi dalam PCHS memberikan pengembalian positif. Rata-rata, lembaga melaporkan penghematan biaya sebesar 28% (SD = 9%) setelah 2 tahun.

### 7. Perbandingan Antar Lembaga

Analisis cluster mengidentifikasi tiga kelompok lembaga berdasarkan tingkat keberhasilan implementasi PCHS:

- Kelompok 1 (High Performers): 32% lembaga
- Kelompok 2 (Medium Performers): 48% lembaga
- Kelompok 3 (Low Performers): 20% lembaga

Uji ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil implementasi antara ketiga kelompok ini ( $F(2, 47) = 28,6, p < 0,001$ ).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang efektivitas strategi pengawasan berbasis PCHS dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah di Provinsi Aceh. Namun, tantangan implementasi, terutama terkait resistensi pegawai, menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang memadukan teknologi dengan manajemen perubahan yang

efektif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi mengatasi resistensi dan mengoptimalkan adopsi PCHS di berbagai konteks lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh.

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, meningkatkan keterampilan SDM dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Dengan melakukan analisis kebutuhan, merancang program pelatihan yang komprehensif, melibatkan para ahli, melakukan evaluasi, menciptakan budaya pembelajaran, memberikan insentif, memperhatikan infrastruktur teknologi, dan mendorong kolaborasi antar lembaga, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat memastikan bahwa SDM mereka siap menghadapi tantangan pengawasan di era digital. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
2. Sebagai kesimpulan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh merupakan tantangan multifaset yang menyentuh hampir setiap aspek tata kelola. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan unsur hukum, kelembagaan, teknologi, dan budaya. Keberhasilan dalam upaya ini dapat menghasilkan lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh yang lebih efektif, efisien, dan tepercaya, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola yang demokratis dan meningkatkan hasil bagi warga negara. Namun, ini adalah perjalanan yang memerlukan komitmen, inovasi, dan keterlibatan berkelanjutan dari pemerintah di Kota Banda Aceh dan warga negara.
3. Strategi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap implementasi sistem pengawasan baru di lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh memerlukan pendekatan



multifaset yang menggabungkan komunikasi yang kuat, keterlibatan karyawan, pelatihan yang komprehensif, dukungan kepemimpinan, manajemen perubahan yang efektif, dan fleksibilitas dalam implementasi. Dengan memahami sumber resistensi, mengatasi kekhawatiran secara proaktif, dan membangun dukungan melalui partisipasi dan demonstrasi manfaat nyata, lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh dapat secara efektif mengelola transisi ke sistem pengawasan baru. Pendekatan yang sabar, konsisten, dan berpusat pada manusia ini tidak hanya dapat mengurangi resistensi, tetapi juga dapat mengubahnya menjadi dukungan aktif untuk perubahan, yang pada akhirnya mengarah pada implementasi yang lebih sukses dan efektif dari sistem pengawasan baru.

Berikut ini merupakan rekomendasi yang dapat penulis sampaikan :

1. Buat kerangka kerja pengawasan yang mengintegrasikan pendekatan pencegahan dan pengendalian, termasuk indikator kinerja utama dan parameter evaluasi untuk memastikan sistem yang

efektif.

2. Gunakan teknologi seperti analitik data dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau dan menganalisis data kinerja lembaga secara *real-time*, mendeteksi anomali, dan merespons masalah secara proaktif.
3. Latih pegawai dengan keterampilan khusus dalam pengawasan dan kontrol untuk memastikan mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum menjadi masalah besar.
4. Lakukan audit rutin dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah dengan fokus pada proses pengawasan dan pencegahan. Gunakan hasil audit untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada.
5. Libatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam proses pengawasan dengan membentuk komite pengawasan bersama. Ini akan memastikan adanya pandangan yang luas dan mendukung transparansi serta akuntabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alberque, W., Chaimpan, A., Covington, S. R., Fix, L., Ford, C., Jankowski, D. P., & Peczeli, A. (2021). The Future of Arms Control in a Multilateral and Multi-Domain Environment. NATO Defense College Research Papers No. 21, 21, (LLNL-JRNL-826175).
- Ambrose, M. J. (2018). The control agenda: a history of the strategic arms limitation talks. Cornell University Press.
- Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The identity challenge in finance: from analogue identity to digitized identification to digital KYC utilities. *European Business Organization Law Review*, 20, 55–80.
- Biden, J. R. (2021). Interim national security strategic guidance. The White House, 8.
- Buryj, M. (2020). Cold War Proxy Wars: A Threat To The Unipolar World Order, A Realist View.
- Chisty, N. M. A., Baddam, P. R., & Amin, R. (2022). Strategic Approaches to Safeguarding the Digital Future: Insights into Next-Generation Cybersecurity. *Engineering International*, 10(2), 69–84.
- Donovan, R. (2021). Statistical Analysis of Institutional Trust
- Ely Sukmana. (2022). KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE DI ERA PANDEMI DI KABUPATEN SUMEDANG. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2).
- Sarjito, A. (2024). STRATEGI RESOLUSI DILEMA KEAMANAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintah di Provinsi Aceh*, 8(1), 45-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2157>
- Kussuma, A. A. (2021) Penerapan E - government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Visioner*, 13(2): 145-157.
- Fauziah, N. M. (2019). Pengembangan E - Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2): 163 - 178.

- Martínez, C. P. J., Benito, B., & García, S. I. M. (2021). Efficiency in the governance of the Covid - 19 pandemic: political and territorial factors. *Globalization and Health*, 17(1):13.
- Mustafa, K. K., & Deodatus, P. S. (2021). Technology and Immigration System : A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania. (*PJGD*), 2(2): 81
- Rumimpunu, S. R., Tampi, J. R., & Londa, V. Y. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik.
- Sudewo, P, A. (2023). Implementasi Learning In The Flow Of Work Pada Lembaga Pemerintah di Provinsi Aceh. *Jurnal Kewidyaiswaraan* 8 (2), 95-107.
- Tanjung, F, M, et al. (2022). STRATEGI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Volume IX Nomor 4
- Prasetyo, T, et al. (2023). Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan Illegal Fishing di Kabupaten Natuna.